



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan lembaga dimana orang – orang yang memiliki kepentingan relative homogeny berhimpun untuk meningkatkan kesejateraan. Dengan kata lain koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana di dalam koperasi berlandaskan azaz kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi mengutamakan kesejateraan anggotanya. Koperasi Indonesia memiliki pengertian hampir sama dengan pengertian koperasi pada umumnya, yaitu sebuah organisasi usaha yang dipegang dan dilaksanakan oleh seseorang untuk kepentingan bersama. Saat ini perkoperasian di Indonesia sangat memprihatinkan karena sebanyak 27 persen atau sekirar 48.000 koperasi yang tidak aktif dari jumlah koperasi di Indonesia saat ini sebnayak 177.000 koperasi. Saat ini koperasi di Indonesia masih berkembang menuju ke tahap yang lebih baik. Peranan koperasi adalah mengembangkan seluruh potensi serta kemampuan para anggota dan masyarakat umum, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan perekonomian nasional, dan meningkatkan kreativias serta jiwa berorganisasi para pelajar di Indonesia.

Berdasarkan undang – undang No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama di bidang ekomoni, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dalam suatu kegiatan ekonomi tentu akan menghasilkan suatu hasil akhir yang di sebut juga laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum mempunya arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Standar Akutansi Keuangan yaitu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat

di sajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas atau laporan arus data), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industry dan goeografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Erhas A (2011;78) dalam laporan keuangan koperasi terdiri dari beberapa laporan yaitu :

- a. Neraca, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan.
- b. Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- c. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menginformasikan perubahan ekuitas dalam suatu periode tertentu.
- d. Laporan arus kas, menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.
- e. Catatan atas laporan keuangan, menginformasikan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan standar yang digunakan dalam penyusunannya laporan keuangan koperasi menggunakan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas *public* atau yang biasanya disebut SAK ETAP. SAK ETAP merupakan standart akuntansi baru untuk koperasi dimana pada tanggal 17 juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standart Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah di sahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP ini sendiri berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang di mulai pada atau setelah 1 januari 2011 namun penerapan dini diperkenankan. Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK

dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 182 halaman dan 30 bab. Selain itu diterbitkannya SAK ETAP sendiri bertujuan untuk memudahkan pengusaha kecil atau menengah untuk menyusun laporan keuangan sendiri sehingga dapat berguna bagi intern atau untuk mendapatkan dana.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan dari pada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI SAK – ETAP PADA KOPERASI (STUDY KASUS PADA KPRI UB KOTA MALANG)”

Dengan adanya perubahan dalam hal peraturan menyusun laporan keuangan di tingkat negara, maka penyusunan laporan keuangan pada koperasi tersebut diharapkan telah menyesuaikan dengan peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antara koperasi terutama daya bandingnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai bagaimana implementasi Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan koperasi

Koperasi KPRI UB di pilih menjadi objek penelitian karena koperasi ini telah menerapkan SAK ETAP. Penelitian ini mengetahui bagaimana SAK ETAP di terapkan pada laporan Neraca, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas dan cacatan atas laporan keuangan di koperasi KPRI UB. Disini saya menggunakan data 2018 di karenakan saya tidak bisa memperoleh data terbaru dari koperasi KPRI UB akibat pandemi wabah Covid-19.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standart akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada KPRI UB Malang?
2. Apakah penerapan SAK ETAP pada KPRI UB Malang sudah dilakukan dengan baik dan benar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan standart akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada KPRI UB Malang.
2. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada KPRI UB Malang sudah dilakukan dengan baik dan benar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah di teliti peneliti, maka manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi SAK-ETAP. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan SAK-ETAP bagi Koperasi KPRI UB.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Kepada ilmu pengetahuan, diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian sebelumnya agar kedepannya menjadi lebih baik
- b. Kepada mahasiswa akuntansi diharapkan akan menjadi acuan untuk lebih mengembangkan kecerdasan yang dibutuhkan untuk bisa bersaing dan dapat mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja.

- c. Kepada pihak instansi, diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi, apakah pelaporan standar keuangan sudah sesuai dengan SAK-ETAP yang sudah ditetapkan.